

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terhadap upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengelolaan penerimaan PBB-P2 Kota Tangerang Selatan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Pengelolaan penerimaan PBB-P2 Kota Tangerang Selatan dilakukan seperti berikut.
  - a. Perencanaan pengelolaan dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan dengan menetapkan target penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya dengan didasari oleh potensi penerimaan pajak yang dipetakan dari target dan realisasi tahun sebelumnya. Selain itu, dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak serta informasi penting mengenai PBB-P2.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan PBB-P2 Kota Tangerang Selatan dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan telah sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Berdasarkan laporan kinerja, Bapenda Kota Tangerang Selatan mengelola penerimaan PBB-P2 tahun 2018-2020 dengan baik karena indikator capaian kinerja pengelolaan PBB-P2 mencapai 80% sampai 100%. Namun, terdapat kemungkinan bahwa kinerja yang dilakukan tetap kurang optimal karena pengawasan pengelolaan hanya bergantung pada keluaran atau *output*, belum sampai realisasi penerimaan pajaknya.

2. Kendala masih ditemukan dalam proses pemungutan PBB-P2 Kota Tangerang Selatan sehingga angka target pajak yang telah ditentukan tidak tercapai. Kendala tersebut antara lain sebagai berikut.
  - a. Data objek PBB-P2 kurang diperbarui sehingga jumlah NOP lebih banyak dibandingkan jumlah objek PBB-P2 di lapangan. Hal tersebut dapat terjadi karena banyak data objek pajak yang sudah berubah, tapi belum dilaporkan dan dilakukan pendataan atas perubahannya.
  - b. Kesadaran wajib pajak Kota Tangerang Selatan untuk membayar PBB-P2 masih perlu ditingkatkan karena banyak dari wajib pajak yang merasa tidak memiliki kepentingan untuk membayar pajak.
  - c. Kurangnya sanksi yang dapat merangsang kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya karena wajib pajak cenderung memilih untuk tidak membayar pajak jika ada celah kesempatan.
3. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Bapenda telah menerapkan beberapa upaya yang diharapkan mampu meningkatkan penerimaan PBB-P2 diantaranya sebagai berikut.

- a. Mengoptimalkan pelayanan PBB-P2 dengan memanfaatkan teknologi internet sehingga terbentuk beberapa inovasi pelayanan digital diantaranya pembayaran PBB-P2 yang dapat dilakukan melalui berbagai platform digital, pemungutan dengan e-SPPT menggunakan SIMPPEL PBB, dan aplikasi iPBB Tangsel.
  - b. Memperbaiki basis data objek PBB-P2 dengan melakukan sensus PBB dan bekerja sama dengan BPN yang berhasil menaikkan potensi penerimaan PBB-P2 karena meningkatkan jumlah objek pajak sebesar 0,33% pada tahun 2017 dan 2,5% pada tahun 2018.
  - c. Melaksanakan pemungutan PBB-P2 keliling dengan mendatangi wajib pajak dari tingkat kecamatan sampai RT dan RW dan membuka pelayanan loket Sabtu Minggu di beberapa titik agar wajib pajak yang terlalu sibuk di hari kerja dapat membayar di hari Sabtu atau Minggu.
  - d. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh, bahkan memberikan hadiah pada wajib pajak yang memenangkan penghargaan utama.
4. Berdasarkan kendala dalam pemungutan PBB-P2 Kota Tangerang Selatan yang diketahui, penulis berusaha membuat strategi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 Kota Tangerang Selatan diantaranya sebagai berikut.
- a. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan digital pada laman SIMPPEL PBB dan aplikasi iPBB Tangsel dengan membuat tampilan yang lebih menarik serta memperbarui fitur agar lebih nyaman digunakan wajib pajak.

- b. Pemberlakuan sanksi yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak seperti pemberlakuan sanksi sosial yang tegas dengan menempelkan stiker tanda belum melunasi PBB-P2 pada objek yang pajaknya belum dilunasi atau memberikan sanksi administrasi yang besar.
- c. Memberikan insentif kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk membayar PBB-P2. Insentif yang diberikan dapat berupa pembedaan tarif PBB-P2 bagi yang melunasi pajaknya di awal tahun atau pemberian perlakuan khusus bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria patuh.

#### **4.2. Saran**

Saran yang dapat diberikan penulis kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 di Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut.

1. Pengawasan pengelolaan PBB-P2 oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan perlu mempertimbangkan aspek realisasi penerimaan PBB-P2 agar indikator yang dibuat benar-benar mengukur seberapa optimal pengelolaan penerimaan oleh Bapenda Kota Tangerang Selatan.
2. Mengoptimalkan pemutakhiran data objek PBB-P2 agar data mengenai objek pajak terus diperbarui. Pemutakhiran data objek PBB-P2 yang optimal akan meningkatkan potensi penerimaan pajak karena jumlah objek pajak dapat terus bertambah.
3. Melanjutkan penerapan strategi yang sudah dilakukan dan memberikan hasil yang cukup efektif dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2, contohnya

pelayanan mobil keliling PBB-P2 dan pelayanan loket Sabtu Minggu. Strategi tersebut juga dapat diperbarui dengan inovasi-inovasi baru yang menarik agar dapat meningkatkan penerimaan PBB-P2 lebih tinggi.

4. Penerapan sanksi yang berat dan pemberian insentif kepada wajib pajak perlu dilakukan pengkajian lebih dalam agar menjadi upaya yang efektif dan tepat tujuan.